

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan asset multi guna yang tidak saja menghasilkan produk seperti kayu, rotan, getah, dan lain-lain, tetapi juga memiliki nilai lain berupa jasa lingkungan. Selain itu, Hutan merupakan salah satu sumber daya alam terbarukan yang memiliki peran penting dalam menopang kehidupan manusia, sumber daya ini memiliki aset multiguna (Fauzi, 2006).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan jasa lingkungan yang dimaksud adalah a) pemanfaatan air, b) wisata alam, c) perlindungan keanekaragaman hayati, d) penyelamatan dan perlindungan lingkungan, e) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Menurut Triani (2009), air dapat dibedakan menjadi air permukaan dan air tanah. Air permukaan (*surface water*) dapat diperoleh langsung dari sungai, danau atau laut, yang alurnya (*surface flow*) dikenal dengan istilah Daerah Aliran Sungai (DAS). Ekosistem suatu DAS biasanya terbagi ke dalam tiga bagian yaitu hulu, tengah dan hilir. Daerah hulu sebagai penyedia air pada umumnya merupakan

kawasan hutan (Triani, 2009). Oleh karena itu, stabilitas pemanfaatan sumber air akan sangat ditentukan oleh keutuhan dan kemampuan ekosistem serta pemeliharaan masyarakat sekitar hutan terhadap fungsi hidrologis hutan (Antika, 2011).

Sub DAS Way Betung mengalir melalui kawasan hutan Register 19 dan menjadi sumber air utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandar Lampung. Selain itu, air dari Sub DAS ini juga menjadi sumber air untuk perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), taman wisata, rumah tangga, kegiatan pertanian dan sektor industri lainnya (Yuwono *et al.*, 2011). Kontribusi Sub DAS Way Betung hulu sangat besar bagi kegiatan ekonomi di Kota Bandar Lampung karena segala aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar apabila kondisi hulu DAS terjaga. Perubahan penggunaan hutan menjadi kebun campuran, lahan kering, permukiman dan semak menyebabkan penurunan kemampuan tanah dalam menginfiltasikan curah hujan sehingga mengakibatkan kerusakan fungsi hidrologi DAS Way Betung (Yuwono *et al.*, 2011). Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Kondisi masyarakat sekitar hutan yang umumnya berada pada kondisi kemiskinan dan tertinggal cenderung akan mengorbankan hutannya untuk mempertahankan hidup. Akibatnya, hutan mengalami degradasi dan akan terganggu fungsi hidrologinya dan berimplikasi pada menurunnya ketersediaan air baku yang secara langsung maupun tidak langsung akan dirasakan oleh pemanfaat air di bagian hilir (Triani, 2009).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan penerapan pembayaran jasa lingkungan (PJL) antara pemanfaat jasa (*buyer*) maupun penyedia jasa (*seller*) untuk mendorong masyarakat agar bersedia melakukan upaya konservasi, selain itu masyarakat juga akan mendapatkan dana kompensasi karena telah melakukan upaya konservasi tersebut (Dasrizal *et al.*, 2012). Contoh penerapan PJL air di Indonesia adalah PJL DAS Cidanau di Serang Banten dan PJL DAS Brantas di Malang. Beberapa potensi *buyer* pada program ini adalah PDAM, perusahaan AMDK, taman wisata, hotel dan pemanfaat jasa air lainnya, sedangkan *seller* yang dimaksud adalah masyarakat yang berada di hulu Sub DAS Way Betung. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu diketahui kesediaan menerima (*Willingness to Accept*) dari penyedia jasa (*seller*) agar mendapatkan harga yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dana kompensasi dari hasil negosiasi *buyer* dan *seller* tersebut akan diberikan kepada masyarakat hulu (*seller*) untuk biaya konservasi hutan agar dapat mengurangi kerusakan hutan yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas air Sub DAS Way Betung. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya penelitian mengenai “Kesediaan menerima pembayaran jasa lingkungan air Sub DAS Way Betung Hulu oleh masyarakat”.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui nilai kesediaan menerima (WTA) masyarakat terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan Sub DAS Way Betung hulu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTA.
3. Mengetahui bentuk-bentuk insentif yang diinginkan masyarakat.

C. Manfaat penelitian

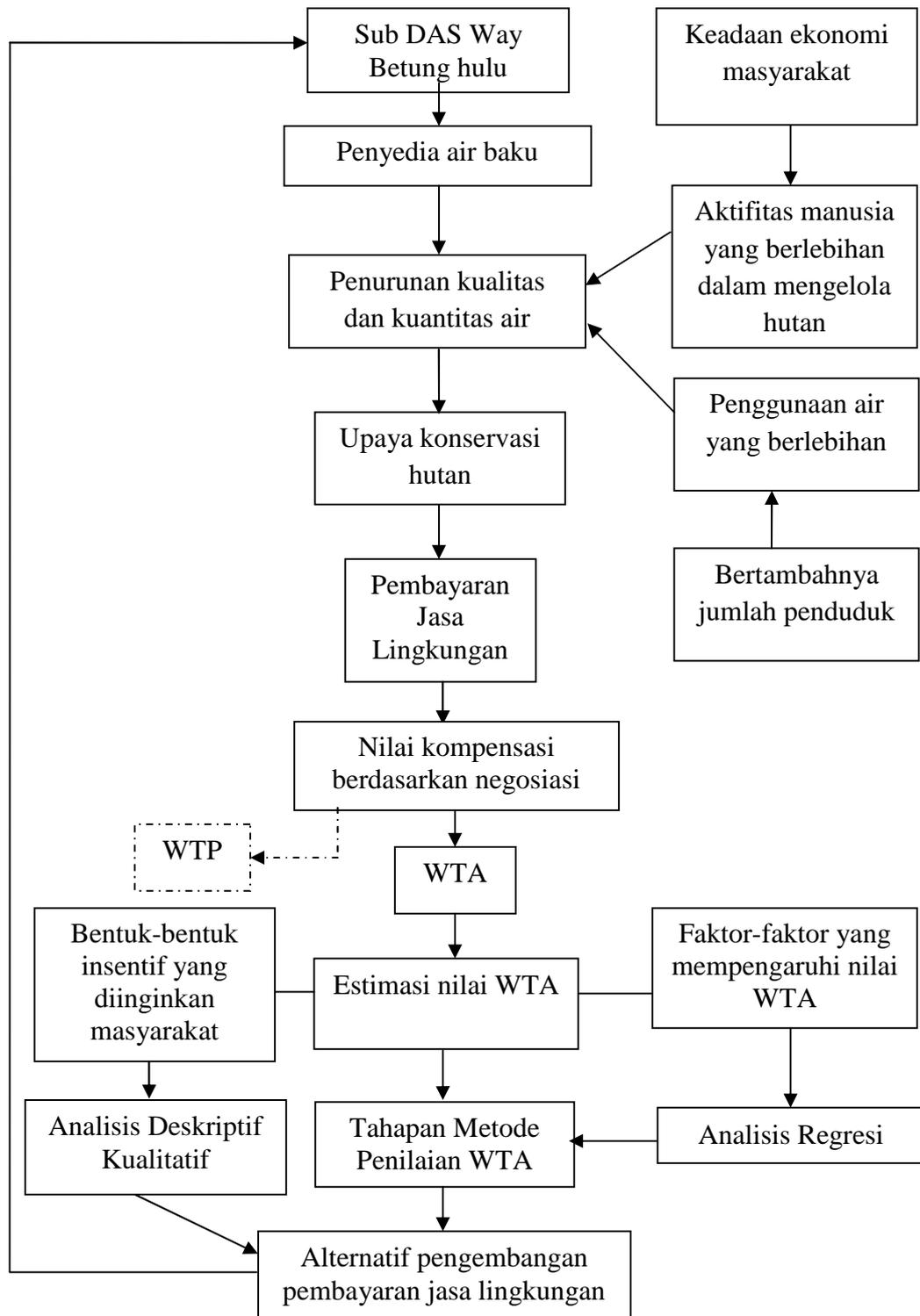
Hasil dari penelitian tentang penilaian jasa lingkungan diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Masyarakat sebagai pendorong untuk melakukan upaya konservasi hutan.
2. Pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan terkait penerapan kebijakan mengenai Pembayaran Jasa Lingkungan air di Provinsi Lampung.
3. Peneliti dan mahasiswa sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

Sub DAS Way Betung hulu merupakan penyedia jasa lingkungan air yang cukup besar untuk dimanfaatkan bagi masyarakat maupun pemanfaat jasa air lainnya seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), taman wisata, hotel dan perusahaan atau masyarakat hilir yang menggunakan air dari Gunung Betung. Adanya perambahan dan pengelolaan kawasan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air menyebabkan kerusakan hutan dan berdampak pada kualitas serta kuantitas air Sub DAS Way Betung hulu. Terlebih lagi masyarakat dan perusahaan tersebut memanfaatkan air yang disediakan oleh Sub DAS Way Betung hulu secara terus-menerus sehingga dikhawatirkan akan menurunkan kualitas dan kuantitas air Sub DAS Way Betung hulu. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya konservasi untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air DAS Way Betung Hulu agar tetap menghasilkan jasa lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya konservasi adalah dengan menerapkan instrumen ekonomi yaitu Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL). Skenario yang ditawarkan pada program PJL ini adalah masyarakat sekitar Sub DAS Way Betung hulu sebagai penyedia jasa lingkungan (*seller*) dimana masyarakat akan diberi insentif/dana kompensasi agar masyarakat bersedia melakukan upaya konservasi hutan di hulu DAS, sedangkan pemanfaat jasa lingkungan (*buyer*) akan membayar insentif tersebut kepada masyarakat hulu DAS. Perhitungan nilai ekonomi dari jasa lingkungan biasanya ditentukan dari keinginan membayar (*Willingness to Pay*) dari pemanfaat dan keinginan menerima (*Willingness to Accept*) dari penyedia sehingga akan menghasilkan suatu harga yang sesuai antara kedua belah pihak (DANIDA, 2011), berdasarkan kondisi tersebut maka perlu diketahui nilai kesediaan masyarakat menerima dana kompensasi PJL dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tersebut serta bentuk-bentuk insentif yang diinginkan masyarakat. Metode yang digunakan untuk mengetahui nilai WTA yaitu dengan metode penilaian WTA dan analisis regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai WTA, sedangkan untuk mengetahui bentuk-bentuk insentif yang diinginkan masyarakat akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian diharapkan bisa menjadi alternatif pengembangan program pembayaran jasa lingkungan Sub DAS Way Betung hulu.



Keterangan:

----- = Tidak diteliti

———— = Diteliti

Gambar. 1 Diagram Alur Kerangka Pemikiran.